



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDE MULYADI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 230167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.195.050.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 718.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 929.000.000
3. Tanah Seluas 1563 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 692.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/275 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 553.550.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 573.900.000**

1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR ` Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
2. MOTOR, YAMAHA BBS/M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/INNOVA ZENIX HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. MOTOR, HONDA MOTOR BEB MATIC/VARIO 150EK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 49.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.382.796.524
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.201.246.524
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.201.246.524

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.